



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

**BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI**

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Triwulan II 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kelautan dan Perikanan atas arahan dan bimbingan yang sudah diberikan. Dan kepada para pihak lainnya yang sudah terlibat dalam penyusunan, turut kami ucapkan terima kasih .

Pada tahun anggaran 2025, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk Triwulan II tahun 2025 serta pembahasannya.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2025 ini mengemban 3 Sasaran Kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 14 butir Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2025 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami sadar bahwa Laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 18 Juli 2025

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Zaki Mubarok

ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tujuan.....	1
c. Tugas dan Fungsi	1
d. Sumber Daya Manusia.....	3
e. Potensi.....	3
f. Permasalahan dan Tantangan	4
g. Nilai Efisiensi Anggaran	4
h. Strategi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal	5
b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025	5
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2025.....	5
d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
IK 1 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	11
IK 2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	14
IK 4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	19
IK 5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP.....	20
IK 6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik	22
IK 7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	24
IK 8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	27
IK 9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN	29
IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	31
IK 11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	32
IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	34

IK 13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	35
IK 14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	36
Realisasi Anggaran.....	36
Tindak lanjut untuk penyesuaian kegiatan	38
Penyesuaian anggaran.....	39
Evaluasi pencapaian kinerja	39
Penyesuaian perencanaan.....	39
Perubahan budaya kinerja.....	40
BAB IV PENUTUP	41
Kesimpulan	41
Saran	41
LAMPIRAN	42
Perjanjian Kinerja Biro HKLN Januari 2025	42
Perjanjian Kinerja Biro HKLN April 2025	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Posisi dan Struktur Biro HKLN dalam Sekretariat Jenderal	2
Gambar 2 <i>Screen capture</i> aplikasi kinerjaku Triwulan II 2025 untuk akun Biro HKLN	9
Gambar 3 <i>Screen capture</i> Dashboard Kinerja Biro HKLN Pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan II 2025 .	10
Gambar 4 Pertemuan bilateral antara KKP dan Second Secretary, Environment, Science, Technology	13
Gambar 5 Pejabat dari Biro HKLN mewakili Indonesia menyampaikan pidato daam forum Our Ocean Conference 2025 di Busan, Korea Selatan.....	18
Gambar 6 KKP News Edisi Mei 2025	21
Gambar 7 KKP News Edisi Juni 2025	21
Gambar 8 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN dalam acara kunjungan yang dilakukan anggota DPR di Salah Satu Wilayah Pesisir Pulau Jawa	26
Gambar 9 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Kepada Menteri KP dan anggota DPR RI ..	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan II tahun 2025.....	3
Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025	5
Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Triwulan I 2025	7
Tabel 4 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan I 2025	8
Tabel 5 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan II 2025	11
Tabel 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023.....	11
Tabel 7 Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan II 2025	14
Tabel 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023	14
Tabel 9 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	16
Tabel 10 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023....	16
Tabel 11 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.....	19
Tabel 12 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023	19
Tabel 13 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	20
Tabel 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	20
Tabel 15 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik.....	22
Tabel 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2018 s.d. 2024.....	22
Tabel 17 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II 2025.....	24
Tabel 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023.....	24
Tabel 19 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan...	28
Tabel 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023	28
Tabel 21 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2025.....	29
Tabel 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2018 s.d. 2024.....	29
Tabel 23 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2025.....	31
Tabel 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023	31
Tabel 25 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2025	32
Tabel 26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023.....	33

Tabel 27 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Triwulan II 2025	34
Tabel 28 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023	34
Tabel 29 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2025	35
Tabel 30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023	35
Tabel 31 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan II 2024 .	36
Tabel 32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023	36
Tabel 33 Kegiatan Tindak Lanjut Untuk Penyesuaian Kegiatan Tahun 2025 Pasca Triwulan II	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait, pada tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dieksplisitkan ke dalam 14 (empat belas) Indikator Kinerja (IKK) dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Jumlah IKK yang realisasinya dapat diukur pada Triwulan II 2025 adalah sebanyak 7 (tujuh) IKK yaitu:

1. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti dengan realisasi IKK sebesar 85,71%;
2. Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebesar 97,66%;
3. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional dengan hasil sebesar 47,62%;
4. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dengan hasil sebesar 89,88%
5. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebesar 94,10;
6. Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN; dengan hasil sebesar 83,74 dan
7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN dengan hasil sebesar 100%.

Strategi yang telah dilakukan Biro HKLN memenuhi target semua IK pada periode triwulan II 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi seluruh bimbingan Kepala Biro HKLN;
- b. Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Biro Perencanaan yang adalah unit kerja pembina pengelolaan kinerja di KKP;
- c. Memastikan semua pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada pelaksanaan IKK beserta stafnya tidak lupa besar target IKK yang dipenuhi di triwulan II 2025; dan
- d. Menemukan solusi jitu jika terdapat kemungkinan target IKK di triwulan II 2025 tidak tercapai sebelum akhir Juni 2025;

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) yang merupakan aplikasi resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan kinerja, pemantauan dan pelaporan hasilnya, skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi Biro HKLN pada triwulan II 2025 adalah 109,03. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Biro HKLN memperoleh predikat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama Triwulan II tahun 2025. Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN juga memuat pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikelola. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Triwulan II Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat untuk digunakan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh tim kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab pada setiap triwulan kepada ketua tim kerja dukungan manajerial Biro HKLN. Selanjutnya kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui sistem elektronik yaitu aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) secara online. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah:

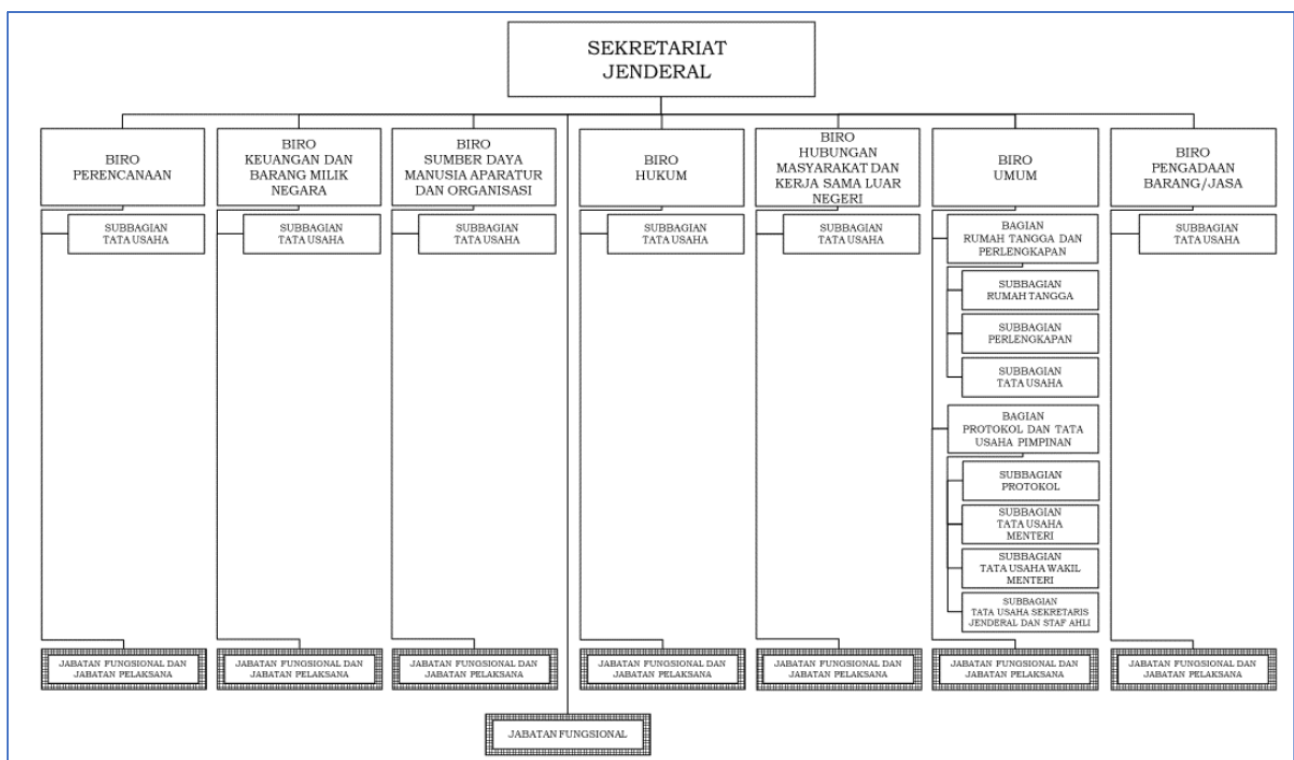
- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan Panjang; dan
- Sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana kinerja triwulan dan atau tahun berikutnya.

c. Tugas dan Fungsi

Terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat Kementerian dan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi Biro HKLN:

- penyiapan koordinasi, perencanaan, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
- penyiapan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan layanan informasi publik;
- penyiapan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
- penyiapan koordinasi, pelayanan, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan pengelolaan perpustakaan; penyiapan koordinasi, penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- penyiapan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.



Gambar 1 Posisi dan Struktur Biro HKLN dalam Sekretariat Jenderal

Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN tidak memiliki Visi dan Misi secara eksklusif tetapi visi, misi, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

- penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas,
- pembinaan, dan
- pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024-2029 yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal KKP mengemban peran penting sebagai motor penggerak pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, rumusan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen, dan
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada Triwulan II tahun 2025 berjumlah 81 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan II tahun 2025

No	Jabatan/Tim Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kepala Biro HKLN	1
2	Pemberitaan dan Opini Publik	30
3	Layanan Informasi Publik	9
4	Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	9
5	Kerja Sama Bilateral	- 7
6	Kerja Sama Multilateral	9
7	Dukungan Manajerial	14
8	Diperbantukan/dipekerjakan	2
Jumlah		81

e. Potensi

Potensi yang dimiliki Biro HKLN dalam melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsi Biro HKLN sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkait adalah:

- a. Komitmen kuat dari Kepala Biro HKLN mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Sumber daya manusia baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang berintegritas, handal, tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro HKLN;
- c. Lebih dari 80% atau mayoritas sumber daya manusia Biro HKLN menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Diantaranya berasal perguruan tinggi nasional begengsi seperti Sekolah Tinggi Perikanan, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara serta beberapa perguruan tinggi di negara maju yang tersebar di Inggris, Jepang, Australia, dan Korea Selatan;
- d. Biro HKLN memiliki *network* nasional dan internasional yang luas termasuk dengan organisasi-organisasi multilateral/kerja internasional bergensi seperti PBB, WTO, IMF, Bank Dunia, ILO, IMO, ASEAN, Uni Eropa, dan CTI-CFF yang bermanfaat dalam mendukung ekspansi pasar dan negosiasi dagang komoditas kelautan dan perikanan Indonesia;
- e. Sumber daya manusia Biro HKLN yang bergerak dalam bidang komunikasi publik dan kehumasan adalah asset unggul, berharga dan berpengalaman yang dimiliki KKP dan telah menunjukkan prestasi memenangkan peringkat/*score* tertinggi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital; dan
- f. Sarana dan prasarana aparatur sipil negara dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai sebagai anugerah kinerja dan pelaksanaan komitmen pimpinan Biro HKLN.

f. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa isu strategis (*strategic issue*) adalah permasalahan utama dan/atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu Biro HKLN merumuskan bahwa isu strategis atau permasalahan, hambatan dan tantangan juga adalah kondisi yang harus menjadi fokus perhatian dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN.

Adapun isu strategis menantang yang telah diidentifikasi untuk tahun 2025 adalah kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan IUU Fishing, peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada Blue Economy dimana hal tersebut yang tidaklah selalu mudah di lapangan terutama dikarenakan faktor eksternal yang sangat dinamis. Isu strategis lainnya adalah pentingnya untuk memelihara fungsi hubungan masyarakat sebagai sarana dan *hub* komunikasi KKP bersama dengan masyarakat.

g. Nilai Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- Data capaian NKO BHKLN pada aplikasi Kinerjaku; dan
- Data alokasi anggaran dan realisasi anggaran BHKLN.

Unit Kerja	Nilai Kinerja Organisasi	Anggaran	Realisasi	%	% NPSP x Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	$6 = 2 \times 3$	$7 = 6 - 4$
Biro HKLN	109.03	7.009.731.000	2.072.631.170	29,57%	764.270.970.930	762.198.339.760
					% Efisiensi = 7/3	108,73

h. Strategi

Strategi yang diambil dan/atau dipilih Biro HKLN menghadapi dan mengatasi permasalahan dan tantangan adalah sebagai berikut:

- Mematuhi seluruh bimbingan Kepala Biro HKLN;
- Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan Kepala dan para pejabat Biro Perencanaan yang notabene merupakan unit kerja pembina pengelolaan kinerja di KKP sekaligus *think thank* pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- Memastikan semua pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada pelaksanaan IKK beserta stafnya tidak pernah lupa akan tanggung jawab pemenuhan target IKK Biro HKLN diantaranya melalui komunikasi informal; dan
- Menemukan solusi jitu jika ada kemungkinan tidak tercapainya pemenuhan target IKK pada setiap periode (triwulanan, semesteran atau tahunan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal

Sampai dengan saat penyusunan laporan ini, dokumen yang digunakan adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP tahun 2025-2029.

b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Biro HKLN melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada 24 Januari 2025. Biro HKLN pada tahun anggaran 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 28.672.222.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Substansi Perjanjian Kinerja yaitu Sasaran Kegiatan dan butir-butir Indikator Kinerja dan targetnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diperoleh Biro HKLN sebagai hasil pelaksanaan seluruh Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN pada akhir tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, rumusan sasaran Biro HKLN pada tahun 2025 adalah:

- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional;
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional;

- Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Dalam rangka mewujudkan dan memungkinkan terukurnya sasaran-sasaran di atas maka seluruh dibentuklah Indikator Kinerja yang pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif supaya memberi kita ukuran keberhasilan dan pencapaian target kinerja. Butir-butir Indikator Kinerja juga merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari informasi kinerja Biro HKLN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya informasi untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN;
- Membantu pihak yang ingin merumuskan penganggaran yang berbasis pada kinerja;
- Memudahkan Biro HKLN untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung;
- Mengubah paradigma kerja menjadi kinerja;
- Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan Biro HKLN untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia;

Manfaat lainnya dari informasi kinerja adalah terbentuknya paradigma bahwa program dan kegiatan memiliki output dan outcome yang jelas sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih jelas keefektifan dan keefisiensinya. Implikasinya adalah seluruh jajaran Biro HKLN terpacu untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Selain itu, Biro HKLN turut semakin mampu memberikan pelayanan kepada publik internal KKP dengan baik

d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025

Keselaran dalam perencanaan indikator kinerja pada hakikatnya turut menjadi prasyarat pemenuhan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan semangat yang diusung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Detil IKK Biro HKLN tahun 2025 dan target IKK Triwulan II 2025 yang disandingkan dengan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Triwulan I 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Target Tw II
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	40
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88	88
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93	15
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96	-
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87	81
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100	-
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85	85
		13	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100	-
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi dan Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Ketua Tim Dukungan Manajerial Biro HKLN dengan menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan KKP. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual masing masing IKK yang telah ditetapkan Kepala Biro HKLN. Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN periode triwulan II tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Gambar berikutnya adalah *screen capture* aplikasi kinerjaku per 14 Juli 2025.

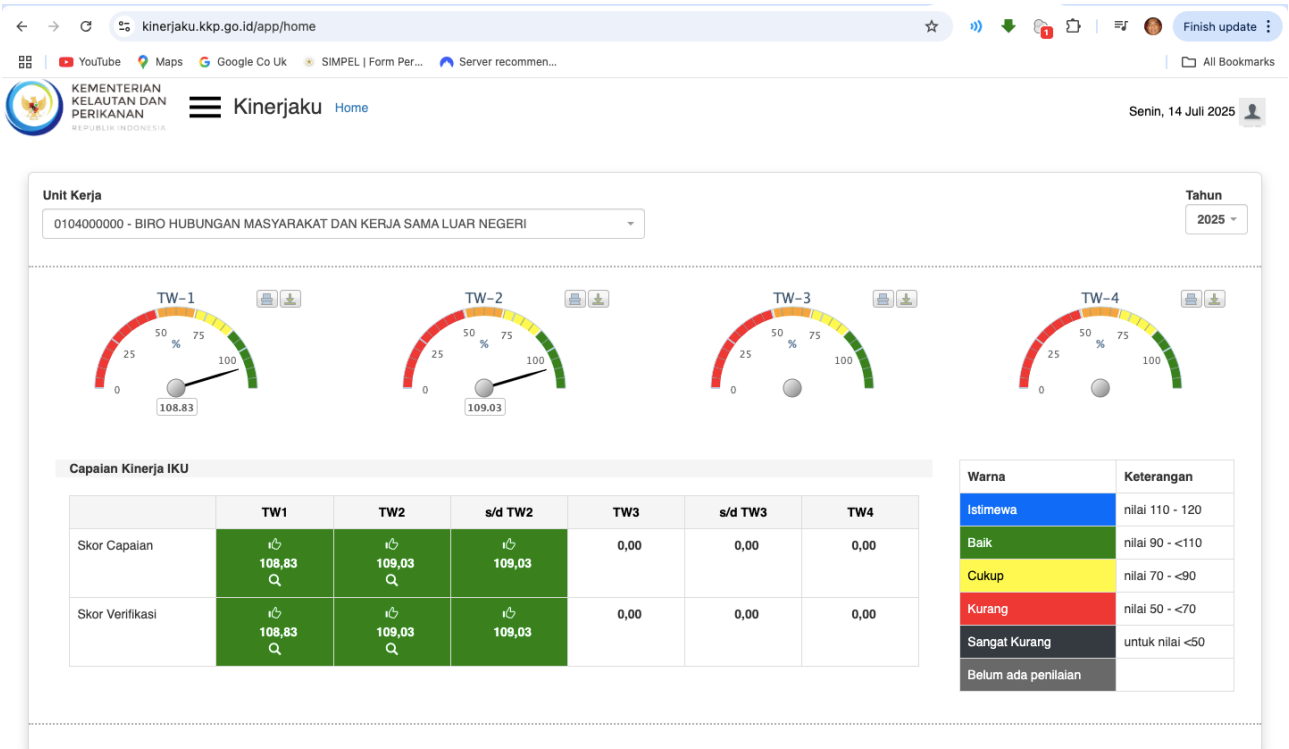
Tabel 4 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan I 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target Tw II	Realisasi Tw II	Persentase Capaian
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	40	85,71%	120%
		2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88	88	97,66%	110,98%
		3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93	15%	47,62%	120%
		4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97	-	-	-
		6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96	-	-	-
		7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	95	89,88%	94,61%
		8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90	90	94,10	104,56%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87	-	-	-
		10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87	81	83,74	103,38%
		11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100	-	-	-
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85	85	100%	117,65%
		13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100	-	-	-
		14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95	-	-	-

Gambar 2 *Screen capture* aplikasi kinerjajuku Triwulan II 2025 untuk akun Biro HKLN

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  e-Kinerja Home Senin, 14 Juli 2025 													
NKO Juni - 2025 Download													
Unit Kerja : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI Skor Kinerja : 109.03													
- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓ - Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol  - Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+													
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni	%	Target s/d Juni	Capaian s/d Juni	%	Tgl Input	
SK.01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri						116,99			116,99			
IKSK.1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	40,00	85,71	120,00	40,00	85,71	120,00	09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	97,66	110,98	88,00	97,66	110,98	09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Akumulasi	93,00	15,00	47,62	120,00	25,00	57,12	120,00	09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%) Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
SK.02	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik						99,59			99,59			
IKSK.02.1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP Data Dukung ✓ 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	0,00			0,00	0,00		09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.02.2	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP Data Dukung ✓ 	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96,00	0,00			0,00	0,00		09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.02.3	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	89,88	94,61	95,00	89,88	94,61	09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.02.4	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP Data Dukung ✓ 	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	90,00	94,10	104,56	90,00	94,10	104,56	09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
SK.03	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN						110,52			110,52			
IKSK.03.1	Nilai PM SAKIP Biro HKLN Data Dukung ✓ 	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.03.2	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN Data Dukung ✓ 	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	81,00	83,74	103,38	81,00	83,74	103,38	09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.03.3	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	85,00	100,00	117,65	09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.03.5	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
IKSK.03.6	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Data Dukung ✓ 	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	0,00			0,00	0,00		09-Jul-2025 15:47	
	Tambah Data Dukung+												
Tutup													

Gambar 3 *Screen capture* Dashboard Kinerja Biro HKLN Pada Aplikasi Kinerja Triwulan II 2025



Metode analisis mengacu kepada rekomendasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II tahun 2025 dengan triwulan II tahun 2024;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP tahun 2025-2029 (jika ada);
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) atau menunjukkan peringkat KKP berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Kementerian/Lembaga secara nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKK selama triwulan II tahun 2025.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai IKK baik antar unit kerja/KL maupun instansi dan lembaga terkait.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian.
8. Untuk IKK yang bersifat tahunan, tetap dijelaskan dalam Laporan Kinerja dengan menyampaikan progres kegiatan pendukung yang telah dilakukan di triwulan II dengan dilengkapi dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK.

IK 1 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Sedangkan tindak lanjut atau implementasi adalah tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan/penerapan atas kesepakatan internasional

Tabel 5 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan II 2025

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
40%	85,71%	120%	15%	50%	120%	97%	nihil	90,21%

Tabel 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	90%

IKK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti merupakan Indikator Kinerja yang baru dikenalkan Biro HKLN pada tahun 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama' dengan target di triwulan II 2025 sebesar 40%.

Pada triwulan II 2025, terdapat 21 dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti. Adapun nama dari 20 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation
2. Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel between Govt. Indonesia and the Govt of Spain;
3. Maritime and Fisheries Surveillance System Project Spain - KKP
4. Letter of Intent on the Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Prancis serta Joint Statement on Developing Indonesia-France Marine and Fisheries Cooperation Programme
5. Plan of Action Strategic Partnership RI - Perancis
6. Technical Cooperation Agreement Proyek Kerja Sama ALDFG KKP – AFD
7. Eco Fishing Port Project ;
8. Mutual Recognition Agreement (MRA) on Quality of Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bergen pada tanggal 1 Oktober 2022
9. Joint Declaration Indonesia - Norwegia
10. Perjanjian kerja sama Ocean for Development Programme antara KKP dan NORAD
11. Solar Cold Chains for Green Economy in Indonesia
12. Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of England concerning Cooperatives Activities in Maritime Affairs ;
13. Blue Planet Fund

14. Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Climate Change and Environment of The United Arab Emirates
15. Extension of the MoU on Maritime Cooperation between The Govt of RI and the Govt of the USA
16. MoU on Economic Cooperation and Capacity Building Between the EFTA States and Indonesia
17. the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission
18. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation;
19. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Natural Resources of The People's Republic of China on Marine Cooperation
20. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture and Rural Affairs of The People's Republic of China on Fisheries Cooperation
21. MoU in the Fields of Marine Affairs and Fisheries Cooperation RI-Arab Saudi

Hingga akhir triwulan II 2025, dari 21 dokumen kerja sama bilateral 18 diantaranya telah ditindak lanjut. Oleh karena itu, realisasi indikator kinerja 'Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti' pada triwulan II 2025 menjadi 85,71%. Target indikator kinerja ini pada triwulan II 2025 adalah 40% maka capaian adalah 120% berdasarkan aplikasi kinerjaku yang menghitung dan menetapkan capaian untuk IKK.

Dibandingkan dengan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029, persentase capaian IKK ini menjadi 90,21%. IKK ini juga tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan perbandingan. Pencapaian target IKK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN, oleh karena itu tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan Tim Kerja Sama Bilateral memenuhi target IKK ini adalah:

- Beberapa kegiatan kerja sama bilateral Amerika dan Eropa , Asia Pasifik, dan Afrika Timur Tengah pelaksanaannya sesuai atau lebih awal daripada jadwal indikatif penyelenggaraan melalui pertemuan yang dilakukan baik secara virtual dan melalui tatap muka;
- Rencana kegiatan kerja sama luar negeri konteks bilateral pada tahun 2025 yang diimplementasikan oleh Biro HKLN terutama yang lebih awal daripada rencana jadwal terutama karena didorong oleh fakta bahwa keikutsertaan KKP di fora kerja sama bilateral melalui Biro HKLN dalam rangka implementasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dan peran serta posisi Biro HKLN sebagai unit kerja KKP pembina hubungan internasional di lingkup KKP ternyata selalu dipandang penting dan diperhitungkan dan menjadi mediator yang berpengalaman di KKP; dan
- Posisi dan keberadaan KKP yang mewakili Republik Indonesia dalam percaturan internasional sektor kelautan dan perikanan di forum bilateral selalu dipandang strategis dan sangat diperhitungkan. Hal ini tercermin dari partisipasi delegasi RI dalam kegiatan kerja sama luar negeri seperti pertemuan bidang kelautan dan perikanan atau pendampingan dan supervisi

Biro HKLN dalam kegiatan kerangka kerja sama Amerika Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika Tlimur Tengah. Sumbangsih pemikiran dari para pejabat dan pegawai Biro HKLN di forum internasional yang diikuti oleh KKP kerap diakui kreatif, inovatif, *out of the box* dan memberikan solusi. Hal ini setidaknya nampak dari penyambutan, penanggapan dan penerimaan yang positif dari negara mitra, dan oleh organisasi-organisasi kerja sama regional dan multilateral, serta juga dibuktikan melalui apresiasi terhadap substansi dokumen kerja sama kelautan dan perikanan Indonesia yang diajukan dan dipantau oleh delegasi Biro HKLN.

Tidak ada kendala serius yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi target IKK pada periode triwulan II 2025. Rencana aksi untuk triwulan atau triwulan-triwulan berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang meneruskan penindaklanjutan dokumen kerja sama bilateral yang tersisa. Penindaklanjutan tersebut tentunya berdasarkan arahan dari pimpinan Biro HKLN. Tidak ada laporan resmi bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Biro HKLN baik sumber daya manusia maupun sumber daya manusia.

Gambar 4 Pertemuan bilateral antara KKP dan Second Secretary, Environment, Science, Technology and Health Affairs, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta



IK 2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) oleh Biro HKLN diperoleh dari survei kepuasan pelayanan kepada pengguna yang telah menerima layanan pengurusan administrasi izin PDLN yang mencakup pengajuan izin PDLN ke Kementerian Sekretariat Negara, pengajuan pembuatan paspor dinas dan rekomendasi visa (bagi PDLN yang memerlukan visa) ke Kementerian Luar Negeri. Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan secara berkala. Responden pengisi kuesioner adalah pelaku PDLN dan narahubung PDLN di unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan.

Tabel 7 Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan II 2025

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88%	97,66%	110,98%	88%	88,89%	101,01%	92%	nihil	106,15%

Tabel 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan II tahun 2025 telah tersedia besar realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IKK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yaitu masing-masing sebesar 97,66% dan 110,98%. Pada triwulan yang sama di tahun 2024 juga sudah ada hasil penghitungan IKK yang sama. Jika dibandingkan dengan hasil realisasi dan capaian IKK yang sama dengan triwulan II 2024 maka pada triwulan II 2025 jelas mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir pada jangka menengah dalam draf rencana strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, maka capaian IKK ini sebesar 106,15%

Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP adalah besaran dalam satuan persen yang dideduksi dari kepuasan para *stakeholder*/pengguna jasa layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yang disediakan oleh Biro HKLN sepanjang triwulan II 2025. Untuk mengetahui kepuasan, Biro HKLN melakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online pada triwulan II 2025 memakai aplikasi google forms survey. Terdapat 20 orang responden yang mengisi dan menyerahkan kuisisioner.

Pertanyaan disampaikan dalam kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?

7. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana? dan
8. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan??

Apabila mengacu kepada tabel di bawah ini yang dimodifikasi lampiran dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka, dengan realisasi sebesar 97,66%, mutu pelayanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP triwulan II 2025 adalah sangat baik atau berkinerja sangat baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dibandingkan dengan target tahun 2025 Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 maka persentase capaian IKK ini sebesar 106,15%. Pada tataran nasional apalagi internasional, tidak tersedia standar yang dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN berbentuk anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Realisasi IKK ini kembali berhasil memenuhi target setelah pada triwulan sebelumnya gagal. Menindaklanjuti rekomendasi dari triwulan sebelumnya maka telah dilakukan upaya persuasif melalui jalur informal oleh para pegawai Biro HKLN dalam rangka memohon perkenan para responden memberi apresiasi setinggi mungkin kepada layanan PDLN yang disajikan Biro HKLN sepanjang triwulan II 2025. Hasilnya manis sehingga Biro HKLN berhasil memenuhi target IKK ini untuk triwulan II 2025.

Beberapa progres kegiatan yang terpantau telah dilakukan oleh para pegawai Biro HKLN yang menjadi petugas administrasi PDLN pada triwulan II 2025 adalah:

1. Pemberian layanan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui pengurusan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Pemberian layanan pengurusan paspor dinas; dan
3. Pemberian layanan pengurusan visa.

Tidak ada laporan resmi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) Biro HKLN dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan layanan PDLN sepanjang triwulan II 2025. Piawainya dan intensifnya para jajaran pimpinan Biro HKLN dalam memotivasi dan mendorong para pegawai Biro HKLN untuk bekerja dengan lebih prima, penuh dedikasi dan loyalitas kepada bangsa dan negara Indonesia tidak bisa diabaikan peranannya dalam keberhasilan Biro HKLN memenuhi target IKK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP .

IK 3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Sebelum menghadiri pertemuan internasional, Delegasi RI wajib menyusun Pedoman Delegasi RI (Delri) agar tercipta keseragaman posisi Delri dan koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri yang didelegasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pedoman Delri tersebut memuat posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia terhadap isu yang dibahas di forum internasional dan Delri memperjuangkan posisi Indonesia untuk dapat diadopsi dalam laporan forum internasional tersebut.

Pengaruh dan peran Indonesia dalam suatu forum internasional dapat dilihat dari persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima dalam forum internasional tersebut. Diterimanya posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia juga menunjukkan bahwa Delri dapat menyuarakan kepentingan nasional di level internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dijabarkan salah satunya dalam bentuk program prioritas Kementerian.

- Posisi adalah kedudukan/pandangan/kepentingan RI dalam pembahasan suatu agenda/isu di forum internasional.
- Rekomendasi adalah usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespons suatu isu tertentu yang dibahas dalam forum internasional yang menjadi kepentingan Indonesia.
- Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam forum internasional. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam kerangka kerja multilateral.
- Diterima adalah dicatatnya/dicantumkannya/disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan internasional.

Laporan dan dokumen sidang dapat berbentuk Leaders' Vision, chairman's statement, joint statement, joint communique, declaration, laporan Delri, agreements, MOU's, summary record/ of discussion, plan of action, Treaty, Resolution, Charter, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework of cooperation, Element of working document, atau work plan/program.

Tabel 9 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
15%	47,62%	120%	35%	37,14%	106,11%	96%	nihil	49,60%

Tabel 10 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	21,21%

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam dua tabel di atas, pada triwulan II 2025 Biro HKLN berhasil memenuhi target IKK karena realisasi IKK sebesar 47,62% sehingga capaiannya menjadi 120% berdasarkan aplikasi kinerjaku, sedangkan besar target IKK ini di triwulan II 2025 adalah 15%.

Sedangkan dibandingkan dengan rancangan awal renstra 2025-2029, capaian menjadi 49,60%. Tidak tersedia standar nasional untuk IKK ini yang dapat dipakai atau diacu sebagai pembandingan. Selain itu dibanding dengan realisasi dan capaian di triwulan yang sama tahun 2024, maka terjadi perolehan peningkatan baik pada realisasi maupun capaian.

IKK Persentase Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2023 hasil pengembangan Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Pada tahun 2025, terdapat 21 (dua puluh satu) target yaitu diterimanya posisi Indonesia pada:

- 1) Dokumen ASEAN Common Understanding and Initiative on Sustainable Small-scale Aquaculture (SSA)
- 2) ASEAN Seafood Alliance
- 3) ASEAN SECTORAL WORKING GROUP ON FISHERIES (ASWGF)
- 4) ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)
- 5) ASEAN Network for Combating IUU Fishing (AN-IUU)
- 6) SEAFDEC Council Director Meeting
- 7) SEAFDEC Program Committee (PCM)
- 8) SEAFDEC Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership
- 9) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
- 10) Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)
- 11) Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
- 12) Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) -Monitoring and Evaluation Working Group
- 13) CTI CFF_Pre-SOM/SOM ke-20
- 14) Coastal States Alliance (CSA) (*done*)
- 15) Food and Agriculture Organization (FAO)- The Fifth meeting of the Parties of Port State Measures Agreement
- 16) Food and Agriculture Organization (FAO)- Technical Working Group on Information Exchange PSMA
- 17) Our Ocean Conference (OOC) (Tw II/April 2025)
- 18) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
- 19) Indian Ocean Rim Association (IORA) Working Group on Blue Economy (*done*)
- 20) The Third United Nations Ocean Conference (UNOC)
- 21) Arafura and Timor Sea (ATSEA)

Berdasarkan hasil yang dihimpun dari tim kerja sama regional dan multilateral Biro HKLN, hingga akhir Juni 2025, terdapat 10 kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN / KKP dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yaitu:

- 1) SEAFDEC Council Director Meeting
- 2) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
- 3) Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
- 4) Coastal States Alliance (CSA) (*done*)
- 5) Food and Agriculture Organization (FAO)- The Fifth meeting of the Parties of Port State Measures Agreement
- 6) Food and Agriculture Organization (FAO)- Technical Working Group on Information Exchange PSMA

- 7) Our Ocean Conference (OOC) (Tw II/April 2025)
- 8) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
- 9) Indian Ocean Rim Association (IORA) Working Group on Blue Economy (done)
- 10) The Third United Nations Ocean Conference (UNOC)

Berdasarkan manual indikator kinerja, realisasi IKK adalah 47,62% dan capaian sebesar 120%. Kontras dengan situasi dan hasil kinerja di triwulan sebelumnya, pada triwulan II Biro HKLN akhirnya berhasil memenuhi besar target IKK sebesar 15%. Penyebabnya adalah ada beberapa kegiatan kerja sama multilateral yang mengundang Biro HKLN untuk terlibat yang dipercepat pelaksanaannya dari yang direncanakan sehingga menjadi pada triwulan II 2025.

Koordinasi dengan organisasi multilateral terkait mengenai jadwal pelaksanaan akan tetap dilanjutkan. Pelaksanaan kegiatan terkait IKK didanai anggaran Biro HKLN dan didukung sumber daya manusia Biro HKLN yang cukup dikenal luas profesionalitasnya sehingga tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Rencana di triwulan berikutnya adalah mengikuti pertemuan multilateral yang tersisa dan mudah-mudahan organisasi kerja sama multilateral mitra Biro HKLN/KKP tidak ada yang memundurkan kegiatan dari jadwal yang direncanakan.

Gambar 5 Pejabat dari Biro HKLN mewakili Indonesia menyampaikan pidato daam forum Our Ocean Conference 2025 di Busan, Korea Selatan



IK 4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Kepemimpinan pada Forum Regional/Multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia (Pemri) untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, atau sebagai anggota Organisasi Internasional (OI) dengan menduduki suatu jabatan strategis pada OI tersebut.

Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kegiatan dan melaksanakan program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi Focal Point OI tersebut, dalam hal ini adalah KKP. Forum Regional/Multilateral adalah organisasi dan pertemuan internasional di tingkat regional/multilateral. OI adalah institusi yang beranggotakan 3 negara berdaulat atau lebih.

Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa Komite dan Working Group, antara lain dapat menjadi Presidensi dan Ketua Organ Subsider. Indonesia juga dapat ditunjuk sebagai Host atau Co-Host, sebagai member of Bureau, Member of Council, Member of Board, Coordinator of (Group). Keberhasilan pencalonan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan

Tabel 11 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
-	-	-	-	-	-	100%	nihil	-

Tabel 12 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tidak ada besar target untuk IKK untuk periode triwulan II 2025 karena penghitungan IKK ini adalah tahunan. Capaian dan realisasi IKK ini juga belum ada untuk triwulan II 2025. Tidak ada standar nasional untuk IKK ini. Kegiatan yang dilakukan di triwulan II 2025 dalam rangka menjamin keberhasilan target IKK ini di akhir tahun adalah memantau kerja sama multilateral dan bersiap untuk melaksanakan setiap rencana arahan dan bimbingan dari pimpinan di Biro HKLN khususnya Kepala Biro HKLN atau ketua tim kerja sama Multilateral. Misalnya tentang nama yang dicalonkan sebagai wakil Indonesia pada organisasi internasional/memimpin sidang internasional/tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional.

IK 5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Sumber informasi hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) Republik Indonesia. Besar indeks dihitung dari rerata nilai dimensi input dan dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang akan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2025 dan diumumkan biasanya pada akhir tahun anggaran.

Tabel 13 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
-	-	-	-	-	-	99	nihil	-

Tabel 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah IKK yang frekuensi penghitungannya bersifat tahunan. Oleh karena itu sebagaimana ditampilkan dalam kedua tabel di atas, belum ada hasil realisasi dan capaian untuk IKK ini pada triwulan II 2025. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi IKK baru diketahui pada akhir tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP adalah IKK yang bukan barang asing dan baru di tahun 2025 meskipun pada Triwulan II 2025 belum ada penetapan besar dan realisasi untuk IKK ini. Sepanjang triwulan I tahun 2025, dalam rangka mensukseskan Biro HKLN dalam memenuhi target IKK ini di akhir tahun, telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Monitoring media sosial dengan
 - 322 konten di instagram,
 - 286 konten di facebook,
 - 138 konten di tiktok, dan
 - 18 video, 11 shorts, dan 23 live konten di youtube;
- Monitoring media massa dengan 3.397 pemberitaan di media massa
- Pelaksanaan 8 kali konferensi pers;
- Pelaksanaan 1 kali Bincang Bahari;
- Pelaksanaan 2 kali Morning Sea;
- Pembuatan 132 siaran pers;
- Produksi 9 episode podcast;
- Produksi 3 episode KKP News Monthly dan 28 episode KKP News Weekly;
- Penyusunan 5 strategi komunikasi
 - a. Strategi Komunikasi Swasembada Garam
 - b. Optimalisasi Peran Penyuluh Kelautan & Perikanan Sebagai Penyampai Informasi Program & Kebijakan KKP.
 - c. Strategi Publikasi Dapur Emas Nusantara
 - d. Strategi Kampanye Media Hari Segitiga Terumbu Karang
 - e. Strategi Publikasi Launching Stelina

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, tidak terdapat kendala serius di internal Biro HKLN seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peralatan dan pendanaan. Rencana kegiatan di triwulan berikutnya masih seputar aktivitas reguler yang terkait dengan pengelolaan layanan produksi; dan publikasi produksi video documenter.

Gambar 6 KKP News Edisi Mei 2025



Gambar 7 KKP News Edisi Juni 2025



IK 6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik adalah IKK baru Biro HKLN yang mulai menjadi tanggung jawab Biro HKLN untuk realisasi dan pencapaiannya pada tahun 2025. Pada hakikatnya, Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik analog dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu mengacu dan berlandaskan kepada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dimana tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada internal KKP terdiri dari:

- a. perencanaan dan
- b. pelaksanaan

Perencanaan meliputi penyusunan kuesioner dan penentuan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup memuat penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik dan Indikator penilaian. Tahapan evaluasi mandiri Keterbukaan Informasi pada KKP terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengumuman. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek dinilai, terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu sarana prasarana, kualitas Informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi; dan digitalisasi.

Tabel 15 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
-	-	-	-	-	-	98	nihil	

Tabel 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik
Triwulan II Tahun 2018 s.d. 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana yang ditampilkan dalam kedua tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan II tahun 2025 belum ada baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik. Jadwal atau periode penghitungan IKK bersifat tahunan. Pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Besar target IKK ini berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2025-2029 adalah 98. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai).

Hasil di bawah ini merupakan kegiatan sebagai *progress* pemenuhan target kinerja dalam rangka pelaksanaan IKK ini sampai akhir triwulan II 2025:

1. Melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP melalui pengelolaan layanan informasi publik (Permen KP 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan KKP);
2. Mengelola layanan informasi publik melalui operasionalisasi ruang layanan PPID KKP (GMB III lantai GF);
3. Mengelola kanal layanan informasi publik (call center, e-ppid, email humas & PPID, whatsapp KKP, media sosial KKP);
4. Mengelola laman resmi Kementerian (situs web KKP, portal PPID, situs web perpustakaan KKP/aplikasi Archipelago);
5. Mengembangkan strategi layanan komunikasi dan informasi (SK PPID, pemutakhiran dan penyusunan SOP LIP): 5 pemutakhiran (done) dan 19 penyusunan SOP baru ;

6. Menyiapkan dokumen layanan informasi publik (dokumen hasil-hasil survei LIP: SKM, SPAK dan SPKP): per triwulan;
7. Melaksanakan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengembangan pengelolaan layanan informasi publik (inisiasi kerja sama dengan BNSP untuk sertifikasi);
8. Melaksanakan perencanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan informasi publik internal KKP; dan
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh KIP (Monitoring sedang berlangsung, dan Evaluasi melalui pengisian SAQ akan dilaksanakan kuartal akhir) sehingga hasilnya KKP mendapatkan nilai keterbukaan informasi publik

Target dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

1. Jumlah Permohonan informasi (per Juni) sebagai berikut:
 - a. Permohonan langsung ke ruang PPID KKP: 105 permohonan
 - b. Permohonan melalui aplikasi e-PPID: 379 permohonan
 - c. Permohonan melalui kanal lainnya (email dan medsos): 949 permohonan
2. Jumlah pengajuan keberatan (total – per Juni): 1 permohonan (DJPT)
3. Pengaduan layanan BHKLN (SP4N Lapor – Per Juni): 44 Pengaduan

Untuk triwulan berikutnya yaitu triwulan III, kemungkinan besar kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan reguler Biro HKLN dalam memberikan layanan informasi publik sehingga tidak ada perbedaan nyata dengan yang telah dilaksanakan di triwulan II 2025.

IK 7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan mulai dikenalkan oleh Biro HKLN pada triwulan III 2023. Pengukuran persentase efektifitas layanan dilakukan dengan penyebaran survei kepada stakeholder (seperti sekretariat Komisi IV DPR, pihak internal KKP dan lain sebagainya) yang telah menerima layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang nilainya diperoleh melalui pengisian kuisisioner oleh stakeholder di akhir triwulan II 2025 setelah dilakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) untuk layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) seperti kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait atau melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 17 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II 2025

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
95%	89,88%	94,61%	89%	96,08%	107,95%	97%	nihil	92,65%

Tabel 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	93,84%

Data pada kedua tabel di atas menunjukkan bahwa pada triwulan II tahun 2025, realisasi untuk IKK ini adalah 89,88% dan oleh karena target IK adalah 95% maka capaiannya menjadi 94,61% atau tidak mencapai 100%. Sedangkan pada triwulan II 2024 realisasi Indikator Kinerja adalah 96,08% sehingga mengalami penurunan baik dari segi realisasi maupun capaian. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir dalam rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu 97% maka capaian dari IKK ini adalah 92,65% Sejauh ini, belum pernah ditemukan bahwa ada acuan atau standar yang bisa menjadi pembanding tingkat nasional apalagi internasional untuk IKK ini.

Manual Indikator Kinerja untuk IKK ini menjadi acuan mengenai efektifitas atau kinerja layanan hubungan lembaga dari Biro HKLN yaitu dalam matriks di bawah ini.

% Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00 - 64,99	Tidak Efektif
65,00 - 76,60	Kurang Efektif
76,61 - 88,30	Efektif
88,31 - 100,00	Sangat Efektif

Berdasarkan matriks di atas, kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat efektif karena persentase efektifitas berada dalam rentang 88,31% sampai dengan 100%.

Penyebab kali ini Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan tidak berhasil dalam memenuhi target IKK ini yang dapat diidentifikasi adalah:

- Adanya pergantian dan mutasi pegawai yang sebelumnya bertugas dalam pengumpulan hasil survei, sehingga pendelegasian tugas tidak dilakukan ke pegawai lainnya.
- Minimnya jumlah sumber daya manusia tim Biro HKLN, hal ini dirasa menyulitkan dalam pembagian tugas untuk melakukan koordinasi dan pendampingan dalam pelaksanaan raker.
- Dampak efisiensi anggaran, tidak adanya transport seringkali menyulitkan pegawai dalam melakukan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan raker, terutama apabila pelaksanaan raker dilaksanakan di luar jam kantor; dan
- Pendampingan yang idealnya dilakukan Tim penghubung dari Biro HKLN sebagai penghubung dari KKP yang mengharuskan pendampingan kegiatan dari sebelum hingga akhir pelaksanaan kunker tidak dapat dilakukan secara maksimal, mengingat pendampingan dari Eselon I juga terbatas sebagai dampak efisien anggaran.

Rencana tindak lanjut di triwulan berikutnya berdasarkan sebab musabab di atas adalah:

- Pendelegasian atau distribusi pekerjaan kepada pegawai Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN selekasnya dituntaskan, selambatnya akhir Juli 2025;
- Jika memungkinkan maka dilakukan penambahan sumber daya manusia Ketua Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN, tapi apabila mustahil maka Ketua Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN memaksimalkan sumber daya manusia yang ada;
- Jika memungkinkan maka dilakukan penambahan sumber daya anggaran untuk Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN, tapi apabila mustahil maka Ketua Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN hendaknya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada;

Layanan hubungan lembaga yang diberikan kepada stakeholder pada triwulan II 2025 adalah pada kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan
2. Kunjungan Kerja Reses Spesifik Dewan Perwakilan Rakyat R

Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN mengawal pejabat KKP yang terlibat dalam kedua kegiatan di atas selama Triwulan II 2025. Dalam rangka mengetahui efektifitas layanan oleh Biro HKLN maka dilakukan pembagian kuisioner online kepada stakeholder Biro HKLN yang merupakan rekan-rekan pegawai Biro HKLN bertugas dan berkoordinasi dengan Biro HKLN sejak masa pra-pelaksanaan di masing-masing lokasi untuk membantu dan mengusahakan fasilitasi kegiatan sebaik mungkin.

Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi yang spesifik dengan pihak eksternal Biro HKLN. Rencana kegiatan untuk triwulan berikutnya dalam rangka pemenuhan target IKK adalah aktivitas reguler seperti di triwulan I yaitu pemberian layanan prima hubungan kelembagaan sesuai dengan arahan, bimbingan dan penugasan dari pimpinan di Biro HKLN.

Gambar 8 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN dalam acara kunjungan yang dilakukan anggota DPR di Salah Satu Wilayah Pesisir Pulau Jawa



Gambar 9 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Kepada Menteri KP dan anggota DPR RI



IK 8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan diperoleh melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan setiap triwulan. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diintroduksi Biro HKLN pada triwulan II tahun 2023. Kepuasan layanan dilakukan melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner (secara online). Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pengukuran Skala Likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Ke-9 unsur survey pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
5. Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan? (email, media sosial perpustakaan)

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada tabel di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari penyebaran kuisioner sepanjang Triwulan II 2025, terdapat 16 responden yang menerima layanan perpustakaan dengan jenis sebagai berikut:

- Layanan keanggotaan;
- Layanan pemanfaatan ruangan perpustakaan / baca di tempat; dan
- Layanan penelusuran informasi. Tabulasi hasil pengolahan survey yang dilakukan Perpustakaan dapat dilihat dalam matriks berikut

Tabel 19 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
90	94,10	104,56%	88	91,81	104,31%	94	Nihil	100,10%

Tabel 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	89,33%

Sebagaimana ditampilkan dalam 2 tabel di atas, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada Triwulan II 2025 adalah 94,10. Dengan target pada Triwulan II sebesar 90 maka capaian IKK ini adalah 104,56%. Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah 'Sangat Baik' karena realisasi sebesar 94,10 masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100. Dibandingkan dengan target terakhir rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu sebesar 94 maka capaian IKK adalah 100,10%.

Faktor pendukung keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK adalah arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN tidak diabaikan oleh tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam mewujudkan karya, karsa dan kerja dalam rangka memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang perpustakaan kepada para *customer* perpustakaan KKP. Hingga akhir Triwulan II tahun 2025, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi tertentu dengan pihak eksternal Biro HKLN. Rencana kegiatan di triwulan berikutnya dalam rangka pemenuhan target IKK adalah melanjutkan pemberian layanan reguler perpustakaan KKP dengan memberi perhatian yang lebih lagi kepada aspek standar pelayanan.

Beberapa kegiatan Perpustakaan di triwulan II 2025 berikut turut menunjang keberhasilan kinerja Biro HKLN memenuhi target IKK:

1. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Taruna Poltek AUP Jakarta;
2. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Siswa SMK se DKI Jakarta;
3. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada siswa SD Bojong Rangkas Bogor;
4. Penyerahan Karya Cetak dan Karye Rekam terbitan KKP ke Perpustakaan Nasional RI;
5. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada siswa Sekolah Alam Bekasi;
6. Edukasi dan Literasi Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Komunitas Gifian educlub;
7. Studi banding dari Perpustakaan Badan Bahasa;
8. Studi banding dari Perpustakaan Kemenko PMK; dan
9. Penyerahan Terbitan KKP kepada Library of Congress.

IK 9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Tabel 21 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2025

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target D.	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	D. Renstra
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	87,8	nihil	-

Tabel 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2018 s.d. 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja ini belum tersedia di Triwulan II tahun 2025. Demikian juga dengan targetnya, sehingga capaian IKK ini di triwulan II 2025 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan II tahun 2025 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan.

Oleh karena semakin mendekatnya waktu pelaksanaan pengukuran Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro HKLN oleh Biro Perencanaan, maka kegiatan triwulan II dan rencana di triwulan berikutnya tahun 2025 yang dapat direkomendasikan adalah membaca LKE PM SAKIP dalam aplikasi kinerjaku dan mulai mencicil dokumen yang termaktub dan diperlukan untuk memenuhi LKE.

Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2025.

Tujuan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan dibantu oleh pihak terkait adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Biro HKLN dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil).

Adapun rekomendasi SAKIP Biro HKLN tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal KKP kepada Kepala Biro HKLN nomor Nomor : B.1247/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berupa catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2023 dan sudah ditindaklanjuti serta dapat diakses hasilnya melalui tautan <https://bit.ly/BHKLNTLEvSAKIP2023>. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut terangkum dalam matriks di bawah ini.

No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Tautan Bukti Dukung
1.	Perlu dilakukan internalisasi terkait Informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai memahami ukuran dan capaian kinerja unit kerja organisasi.	Pemberitahuan kepada pegawai Biro HKLN tautan publikasi Laporan Kinerja Biro HKLN 2023 di awal tahun 2024 supaya para pegawai tertarik membacanya.	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1sY5V7uPnODRfhMFFPlueCDQMaOsWOGga?usp=sharing
2.	Perlu adanya peningkatan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan pengukuran kinerja secara berkala.	Substansi pidato Kepala Biro HKLN pada apel pagi mencakup rencana peningkatan keterlibatan Kepala Biro HKLN dalam kegiatan pengukuran kinerja	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1h-MJnXZ_5DDI0Py7Z8qegkN57pOSWSc8
3.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait 1 indikator kinerja yang belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Telah dibangun komunikasi dengan pejabat dari Biro Perencanaan KKP sehingga akan dilakukan tindak lanjut diantaranya dengan diskusi internal Biro Perencanaan atas indikator kinerja Biro HKLN belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/17PYr8Qcx6rM090eCEfvVYmdo5nQ0AdQz

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 23 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2025

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
81	83,74	103,38%	80	81,68	102,10%	89	nihil	94,09%

Tabel 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	65,16

Sesuai dengan informasi tersaji dalam kedua tabel di atas, realisasi IKK ini pada triwulan II tahun 2025 adalah 83,74. Adapun capaian IKK ini adalah 103,38%. Jika dibandingkan dengan target periode terakhir dalam draf rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025-2028 maka capaian IKK ini adalah 94,09%. Dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2024 telah terjadi peningkatan realisasi dari semula yang besarnya 81,68. Demikian juga dengan capaian, pada tahun 2025 lebih besar daripada tahun 2024 yang hanya sebesar 102,10%. Tidak ada standar nasional yang bisa dirujuk Biro HKLN sebagai pembanding dalam kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Tidak diperoleh informasi resmi adanya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam kegiatan pencapaian target IKK ini sepanjang periode triwulan II 2025.

Kegiatan yang sudah dilakukan di Biro HKLN sepanjang triwulan II dalam rangka pencapaian target IKK adalah:

- berbagi informasi kepada para pegawai Bio HKLN yaitu rencana kegiatan seminar atau webinar (berbiaya gratis) melalui komunikasi digital di internal Biro HKLN yakni aplikasi whatsapp agar sebanyak mungkin pegawai Biro HKLN mengikutinya; dan
- penyampaian imbauan sesering mungkin agar pegawai Biro HKLN mengunggah sertifikat yang diperoleh sepanjang tahun 2025 hingga akhir Juni 2025 dari seminar atau webinar yang sudah diikuti ke aplikasi ekinerja.bkn.go.id atau myasn.bkn.go.id

IK 11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 5 jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan;
2. WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal;
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;
4. Opini Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan;
5. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Tabel 25 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2025

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	-	-	-	100%	nihil	-

Tabel 26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana tercantum dalam di atas, untuk triwulan II tahun 2025 belum ada hasil realisasi dari pengukuran IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada triwulan I Tahun 2025. Begitu juga dengan capaiannya karena selain belum adanya realisasi untuk IKK ini juga tidak ada target yang ditetapkan untuk triwulan II 2025.

Pengukuran IKK bersifat tahunan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini yang menjelaskan di triwulan II tahun 2024 juga tidak ada realisasi untuk Indikator Kinerja yang sama.. Tidak ada berita resmi mengenai indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia. Meski belum ada realisasi dan capaian karena merupakan IKK dengan frekuensi pengukuran tahunan, Ketua dan staf Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN selalu siap sedia untuk menyelesaikan laporan temuan BPK yang jika muncul sewaktu-waktu melalui penyampaian oleh Biro Keuangan dan/atau Inspektorat Jenderal KKP.

Selain itu, Biro HKLN mencari informasi melalui internet yang dapat dianggap kredibel terkait dengan minimalisasi peluang temuan BPK. Oleh karena itu, Ketua dan staf Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN memperhatikan rekomendasi yang disampaikan dalam informasi yang ditemukan seperti:

- Menyetorkan sisa uang pada rekening pengeluaran pada akhir tahun
- Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran
- Membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran tertuang dalam DIPA
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memeriksa kas satker
- Mendorong penerapan cashless dengan mengurangi uang tunai melalui penggunaan digital payment, termasuk Cash Management System.

Rekomendasi di internet dalam hal pengelolaan rekening yang juga diperhatikan Ketua dan staf Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN adalah:

- Pembukaan rekening satker pada bank umum dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atau KPPN.
- Rekening yang sudah tidak digunakan atau rekening yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya harus ditutup
- Untuk pengendalian rekening, dilakukan rekonsiliasi rekening antara direktorat PKN dan Kementerian/lembaga secara triwulan. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam dalam Berita Acara Rekonsiliasi rekening.
- Penyetoran Pajak melalui aplikasi e-Bupot

IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. akhir Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh mitra kerja di Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan

Tabel 27 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Triwulan II 2025

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D. Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
85%	100%	117,65%	100%	100%	100%	89%	nihil	112,36%

Tabel 28 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	75%

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100%, dengan target sebesar 85% maka capaiannya menjadi 117,65%. Dibandingkan dengan capaian untuk IKK yang sama di triwulan I 2024 maka terjadi peningkatan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu sebesar 89% maka capaian IKK menjadi 112,35%.

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Tidak termonitor keberadaan indikasi bahwa terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya Biro HKLN dalam bentuk anggaran, sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya dalam segenap kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan II 2025.

Kegiatan sebagai faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target IKU adalah:

- Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN memperhatikan dengan saksama dan siap, siaga untuk sigap menindaklanjuti apabila ada notifikasi rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jendral yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Tim satker Biro HKLN berbudaya kerja cepat, cermat dan tepat mampu memberi dukungan penuh kepada setiap arahan dari jajaran pimpinan Biro HKLN serta menyadari bahwa setiap pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jendral pasti berguna untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Rencana aksi yaitu melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan dilakukan dengan baik dan selamat.

Untuk triwulan berikutnya, Biro HKLN akan melanjutkan aktivitas reguler seperti di triwulan II dalam rangka memenuhi target IKK ini.

IK 13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Di tahun 2025, yang diajukan Biro HKLN adalah Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik

Tabel 29 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2025

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target D. Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ D.Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	-

Tabel 30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam kedua tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan II tahun 2025, belum terdapat realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Hal ini dikarenakan penghitungan IKK yang bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IKK ini. Target akhir jangka menengah dalam Rancangan awal Rencana Strategi untuk IKK ini adaah 100%. Pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dipedomani oleh Biro HKLN sebagai pembanding.

Hingga akhir triwulan II tahun 2025, Biro HKLN telah melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Biro Hukum untuk penyempurnaan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik. Diharapkan selambat-lambatnya di akhir tahun 2025 Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik telah disahkan menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik serta mendapat pengesahan dari Kementerian yang berwenang. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi keefisienan apalagi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai). Untuk triwulan berikutnya, Tim Kerja Layanan Informasi Biro HKLN akan terus melanjutkan konsultasi atau koordinasi dengan Biro Hukum untuk penyempurnaan dan finalisasi.

IK 14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Persentase penyerapan anggaran Biro HKLN adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro HKLN dibandingkan dengan pagu anggaran Biro HKLN

Tabel 31 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan II 2024

Triwulan II 2025			Triwulan II 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	≥95	nihil	-

Tabel 32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, belum dilakukan penghitungan realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN pada periode Triwulan II 2025. Demikian juga dengan targetnya tidak tersedia sehingga capaian IKK ini di triwulan II 2025 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan II tahun 2024 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan tepatnya di akhir tahun anggaran. Oleh karena belum ada realisasi di triwulan II 2025 yang perlu ditampilkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target akhir tahun dalam konsep Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029. Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Sangat diyakini bahwa tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan II 2025.

Realisasi Anggaran

Terdapat informasi *progress* penyerapan/realisasi anggaran oleh Biro HKLN hingga akhir Juni 2025/triwulan II 2025 yang terangkum dalam matriks di bawah ini.

Kelompok Kerja	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	Jumlah Realisasi	% Realisasi
		Juni		
Kerja Sama Bilateral	455.530.000	18.177.454	188.085.393	41,29%
Kerja Sama Multilateral	342.613.000	4.979.224	24.987.496	7,29%
Layanan Produksi dan Publikasi	1.644.810.000	130.084.530	786.478.578	47,82%
Layanan Informasi Publik	364.932.000	59.278.000	215.645.550	59,09%
Layanan Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	168.626.000	12.229.300	70.790.600	41,98%
Layanan Penyebarluasan Informasi Publik melalui media streaming	10.251.000	0	10.251.000	100,00%
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	3.032.350.000	137.182.596	200.742.866	6,62%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Lingkup Sekretariat Jenderal	990.619.000	84.160.549	575.649.687	58,11%
Jumlah	7.009.731.000	446.091.653	2.072.631.170	29,57%

a. Kinerja Anggaran Biro HKLN Tahun 2024

Sejalan dengan informasi yang telah disampaikan di atas, realisasi anggaran Biro HKLN per 30 Juni 2025 berdasarkan aplikasi OM-SPAN adalah sebesar Rp2.072.631.170 dari pagu efektif sebesar Rp7.009.731.000 atau persentasenya sebesar 29,57%.

b. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai umpan balik Perencanaan 2026

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pencapaian target IKK Biro HKLN periode Triwulan II 2025 adalah pada tahun anggaran selanjutnya, frekuensi pengukuran untuk IKK Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan IKK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan hendaknya diubah menjadi tahunan atau semesteran. Alasan dari pengubahan adalah responden dari kuisisioner pada kedua IKK tersebut adalah orang yang sama sehingga terdapat kerentanan kejenuhan untuk mengisi kuisisioner setiap tiga bulan. Walaupun demikian, keputusan berada di tangan Inspektorat Jenderal dan/atau Biro Perencanaan.

c. Tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP

Tujuan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan dibantu oleh Inspektorat Jenderal KKP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Biro HKLN dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil). Pada triwulan I 2025 belum ada diterbitkan rekomendasi SAKIP tahunj 2025 untuk Biro HKLN.

Rekomendasi SAKIP Biro HKLN yang terakhir tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal KKP kepada Kepala Biro HKLN nomor Nomor : B.1247/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berupa catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2023 dan sudah ditindaklanjuti serta dapat diakses hasilnya melalui tautan <https://bit.ly/BHKLNTLEvSAKIP2023>. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut terangkum dalam matriks di bawah ini.

No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Tautan Bukti Dukung
1.	Perlu dilakukan internalisasi terkait Informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai memahami ukuran dan capaian kinerja unit kerja organisasi.	Pemberitahuan kepada pegawai Biro HKLN tautan publikasi Laporan Kinerja Biro HKLN 2023 di awal tahun 2024 supaya para pegawai tertarik membacanya.	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1sY5V7uPnODRfhMFFPlueCDQMaOsWOGga?usp=sharing
2.	Perlu adanya peningkatan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan pengukuran kinerja secara berkala.	Substansi pidato Kepala Biro HKLN pada apel pagi mencakup rencana peningkatan keterlibatan Kepala Biro HKLN dalam kegiatan pengukuran kinerja	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1h-MJnXZ_5DDI0Py7Z8qegkN57pOSWSc8
3.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait 1 indikator kinerja yang belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Telah dibangun komunikasi dengan pejabat dari Biro Perencanaan KKP sehingga akan dilakukan tindak lanjut diantaranya dengan diskusi internal Biro Perencanaan atas indikator kinerja Biro HKLN belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/17PYr8Qcx6rM090eCEfvVYmdo5nQ0AdQz

Tindak lanjut untuk penyesuaian kegiatan

Tindak lanjut berupa Kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya termaktub dalam tabel di bawah ini berdasarkan dokumen rencana aksi Biro HKLN tahun 2025.

Tabel 33 Kegiatan Tindak Lanjut Untuk Penyesuaian Kegiatan Tahun 2025 Pasca Triwulan II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN PENDUKUNG
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi dokumen kesepakatan kerja sama bilateral (rapat koordinasi, keterlibatan KKP dalam pelatihan dengan negara mitra)
	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	Pemberian layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP
	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	Perumusan dan penyampaian posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	Pengusulan pencalonan perwakilan Indonesia pada organisasi internasional/memimpin sidang internasional/tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	Koordinasi seluruh tahapan dalam rangka pemenuhan penilaian indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada dimensi input meliputi: 1. Sumber Daya Manusia & Anggaran; 2. Bahan Informasi 3. Sarana dan Prasarana; 4. Media dan Saluran Komunikasi 5. Pengumpulan data dalam rangka perencanaan program 6. Perencanaan; 7. Pelaksanaan 8. Monitoring dan Evaluasi 9. Program Inovasi
	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	Penilaian LKE KIP
	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pameran di sektor KP dan melaksanakan pelayanan yang efektif pada lembaga mitra pada kegiatan sebagai berikut. 1. Pendampingan Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) 2. Pendampingan Kunjungan Kerja masa Reses atau Kunjungan Kerja spesifik 3. Pendampingan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan 4. Unjuk rasa
	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	Pelaksanaan kegiatan pelayanan pada 9 unsur penilaian pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yaitu: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	Pemenuhan seluruh aspek penilaian pada LKE
	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	Keikutsertaan pegawai Biro HKLN pada pelatihan
	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan BPK
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	Penyelesaian Rancangan Keputusan/Peraturan Menteri
	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	Penyampaian realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala

Penyesuaian anggaran

Berdasarkan *view* yang dilakukan oleh pegawai di Tim Kerja Dukungan Manajerial terhadap aktivitas sumber daya manusia Biro HKLN yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Biro HKLN sepanjang triwulan II tahun 2025, dinamika anggaran yang terjadi di awal tahun fiskal 2025 terutama karena kebijakan efisiensi tidak mempengaruhi secara nyata para sumber daya manusia Biro HKLN dalam bekerja dan berkreasi melalui kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pencapaian target Indikator Kinerja. Tentu saja faktor pendukung utama keberhasilan adalah kebijaksanaan dan kepiawaian Kepala Biro HKLN dalam mengorkestrasi segenap sumber daya manusia Biro HKLN sepanjang triwulan II 2025. Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah Biro HKLN memiliki sumber daya manusia andal yaitu pegawai-pegawai cerdas yang profesional dan berpengalaman dalam bidang pekerjaan hubungan internasional, komunikasi dan kehumasan dan perpustakaan yang tidak diragukan dedikasi serta loyalitas mereka kepada pimpinan.

Evaluasi pencapaian kinerja

Above all, Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,03 adalah inti dari evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan Indikator Kinerja Biro HKLN selama triwulan II 2025 dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, predikat yang diperoleh oleh Biro HKLN adalah 'baik'. Kata baik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa definisi, diantaranya yang relevan dengan laporan kinerja ini adalah:

1. elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya); dan
2. berguna; manjur (tentang obat dan sebagainya);

Oleh karena itu, secara keseluruhan kinerja yang sudah ditunjukkan oleh Biro HKLN sepanjang triwulan II 2025 tidak tak berguna dalam mendukung secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP serta pembangunan sektor kelautan dan sektor perikanan Indonesia.

Penyesuaian perencanaan

Berdasarkan arahan Biro Perencanaan, untuk triwulan III 2025 hendaknya dilakukan penyesuaian atau perubahan pada besar target untuk IKK berikut di triwulan III 2025:

- a. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti dengan hasil sebesar;
- b. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional dengan hasil sebesar;

Alasan penyesuaian adalah karena capaian IKK di triwulan II terlalu tinggi dibandingkan target sehingga tidak atau kurang menantang.

Perubahan budaya kinerja

Definisi dari istilah ‘budaya’ menurut Bapak Antropologi Indonesia yakni Prof. Koentjaraningrat (alm) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Definisi ini cukup sejalan dengan definisi dari frasa ‘*performance culture*’ dari sebuah sumber yang dipercaya kredibel di internet yang terjemahan bebasnya ke dalam Bahasa Indonesia adalah ‘budaya kinerja’ yaitu ‘*A system that engages, develops, and inspires a diverse, high-performing workforce by creating, implementing, and maintaining effective performance management strategies, practices, and activities that support mission objectives.*’ Terjemahan bebas dari definisi ‘*performance culture*’ atau ‘budaya kinerja’ tersebut adalah ‘Sistem yang mengikat, mengembangkan dan menginspirasi tenaga kerja yang beragam dan berkinerja tinggi melalui pembentukan, pelaksanaan dan pemeliharaan strategi, praktik dan kegiatan manajemen kinerja guna mendukung pencapaian tujuan.’

Berdasarkan definisi ‘*performance culture*’ di atas dan berdasarkan hasil komunikasi informal dengan beberapa pegawai senior di Biro HKLN maka dapat disimpulkan bahwa Biro HKLN telah lama memiliki sistem kinerja yang cakap atau mumpuni (*excellent*). Hal ini terutama didorong oleh para pegawai yang mengerjakan tugas dan berfungsi mengelola hubungan internasional memiliki horizon berpikir atau wawasan yang tidak hanya dibatasi domestik namun mendunia dan ditularkan kepada pegawai yang mengurus kehumasan dan komunikasi. Apalagi pegawai yang menangani hubungan dengan negara-negara maju di Eropa, Asia dan Amerika Utara tidak jarang mempengaruhi para pegawai lainnya untuk tidak enggan mencontoh sumber daya manusia dari negara maju dalam bekerja dan bekarya.

Dengan demikian dapat disimpulkan kalau pelaksanaan SAKIP di Biro HKLN selama triwulan I 2025 tidak mengubah sistem atau ‘*performance culture*’ yang sejak lama dihayati dan berlaku di organisasi birokrasi dan sumber daya manusia aparatur Biro HKLN secara signifikan. Meskipun demikian, pelaksanaan SAKIP nyata telah memberikan warna baru dan nuansa yang lebih segar yang tentu saja mendukung produktivitas kerja dan kondusivitas serta sinergi antar sumber daya manusia aparatur baik dalam kerangka hubungan horizontal dan hubungan vertical yaitu antara pimpinan dan bawahan secara timbal balik.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari 14 Indikator Kinerja tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2025, pada triwulan II 2025 telah terdapat beberapa yang terealisasi yaitu:
 - a. IKS.1, Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 40%, realisasi 85,71% maka realisasi berdasarkan aplikasi kinerja menjadi 120%;
 - b. IKS.2, Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, target IK ini adalah 88% sementara realisasi IK mencapai angka 97,66% sehingga capaiannya adalah 110,98%;
 - c. IKS.3, Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 15%, realisasi 47,62%. Capaian IK ini berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerja adalah 120%;
 - d. IKS.02.3, Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, realisasinya sebesar 89,88% Target IK ini adalah 95% maka capaiannya menjadi 94,61%;
 - e. IKS.02.4, Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP, realisasi IKU sebesar 94,10% dengan besar target yaitu 90%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 104,56%;
 - f. IKS.03.2, Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN; dengan hasil sebesar 83,74 dan target sebesar 81. Oleh karena itu capaian IK menjadi 103,38%; dan
 - g. IKS.03.4, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan realisasi sebesar 100 %. Target IKU ini untuk dipenuhi adalah 85% sehingga capaiannya menjadi 117,65%;
2. Pemenuhan target IKK Biro HKLN di triwulan II 2025 diyakini telah melalui pendayagunaan anggaran melalui penyerapan APBN KKP alokasi untuk Biro HKLN secara efektif dan efisien.

Saran

Memperhatikan hasil dan analisis atas capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam bab-bab di atas dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN triwulan berikutnya tahun 2025 beberapa hal di bawah ini dapat menjadi bahan pertimbangan:

1. Biro HKLN seyogyanya terus memegang teguh dan melanjutkan etos berkinerja prima yang sudah ditunjukkan pada triwulan II tahun 2025. Beberapa etos kerja dan kinerja sebagai hasil dari implementasi budaya internal Biro HKLN arahan pimpinan adalah disiplin, kekeluargaan, kreatifitas, *thinking out of the box*, kebersamaan, keterbukaan, proaktif, integritas, responsif, berorientasi masa depan, *need for achievement*, kerja sama, dan tanggung jawab;
2. Memperkuat koordinasi di lingkup internal Biro HKLN dan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu para mitra kerja sama Biro HKLN guna mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian target semua IKU; dan
3. Terkait dengan penyerapan anggaran, perlu ditekankan untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan sinkronisasi waktu pelaksanaan penyerapan anggaran dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kepastian atas efisiensi penganggaran kegiatan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro HKLN Januari 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ari Prabowo**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 29 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

*Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Ari Prabowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR
NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik	5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87
		11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	100
		14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

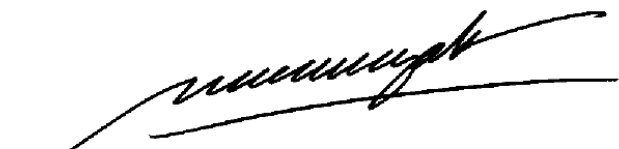
Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	5.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	23.175.222.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025		28.672.222.000

Jakarta, 05 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Ali Prabowo



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zaki Mubarak**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

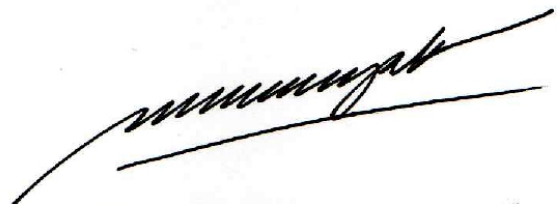
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 April 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal


Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri


Zaki Mubarak

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

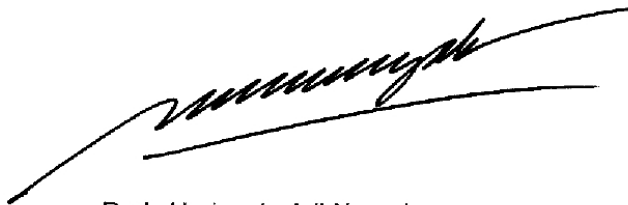
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Dalam Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri	1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87
		11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100
		14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

Data anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	5.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	23.175.222.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025		28.672.222.000

Jakarta, 29 April 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri



Zaki Mubarak

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor 1928/SJ.5/TU.210/VII/2025

Yth. : Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Periode Triwulan II 2025
Tanggal : 18 Juli 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri periode triwulan II Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025, Biro HKLN mempunyai **3 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Utama** yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BHKLN Triwulan II 2025 adalah **109,03**;
3. Realisasi dan capaian seluruh Indikator Kinerja Biro HKLN pada periode Triwulan II 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tw II	Realisasi Tw II	Persentase Capaian
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	40	85,71%	120%
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88	97,66%	110,98%
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	15%	47,62%	120%
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	-	-	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	-	-	-
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	89,88%	94,61%
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90	94,10	104,56%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	-	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	81	83,74	103,38%
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	-		
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85	100%	117,65%
		13	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	-	-	-
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	-	-	-

4. Kami sampaikan pula Laporan Kinerja BHKLN Triwulan II 2025 yang berisikan penjelasan atas realisasi dan capaian indikator kinerja pada tautan sebagai berikut: <https://bit.ly/LapkinjaBiroHKLNTriwu2thn2025>.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Zaki Mubarok

Tembusan
Kepala Biro Perencanaan